

**PERAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM
PENGELOLAAN FESTIVAL KRUI PRO DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA
POLITIK ISLAM**

Delva Novita¹, Isti Arini², Agustamsyah³

^{1,2,3} Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: delvanovita93@gmail.com

Email: istiarini@radenintan.ac.id; agustam@radenintan.ac.id

ABSTRACT

West Coast Regency in the management of the Krui Pro Festival and examines the implementation of the principles of Islamic Political Ethics in festival governance. The Krui Pro Festival, as an international sports tourism event, holds a strategic position in regional tourism development, destination promotion, strengthening local economic activity, and introducing regional culture. This study employed a field research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation involving elements of the Tourism Office, the organizing committee, the sub-district government, MSMEs, the community, religious leaders, and cultural figures. Data validity was achieved through triangulation of sources, methods, theories, and strengthening findings from previous research. The results show that the Tourism Office of Pesisir Barat Regency plays a strategic role in coordinating, facilitating, promoting, and evaluating the implementation of the Krui Pro Festival through collaborative governance involving various stakeholders. From the perspective of Islamic Political Ethics, the principle of trustworthiness is reflected through the implementation of institutional responsibilities, division of tasks based on competence, and coordination and evaluation of activities. The principle of justice ('adl) is evident through the involvement of the community, MSMEs, volunteers, and elements of art and culture in organizing the festival, although the distribution of benefits and the level of participation still show variations between community groups. Meanwhile, the principle of *maslahah* (benefit) is reflected in the festival's contribution to increasing economic activity, promoting the region, strengthening local cultural identity, and developing the tourism sector. Furthermore, the study also identified challenges related to the equitable distribution of benefits, the sustainability of post-event impacts, and social, cultural, and environmental dynamics. Overall, the management of the Krui Pro Festival has demonstrated alignment with the principles of Islamic Political Ethics, although further strengthening is needed in the areas of equitable distribution of benefits, policy sustainability, and the preservation of local socio-cultural values.

Keywords: Tourism Office, Krui Pro Festival, Islamic Political Ethics, Tourism Governance.

ABSTRAK

Pesisir Barat dalam pengelolaan Festival Krui Pro serta mengkaji implementasi prinsip-prinsip Etika Politik Islam dalam tata kelola festival. Festival Krui Pro sebagai event sport tourism bertaraf internasional memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata daerah, promosi destinasi, penguatan aktivitas ekonomi lokal, serta pengenalan budaya daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan unsur Dinas Pariwisata, panitia penyelenggara, pemerintah kecamatan, pelaku UMKM, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, teori, dan penguatan temuan melalui penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berperan strategis dalam koordinasi, fasilitasi, promosi, dan evaluasi penyelenggaraan Festival Krui Pro melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif Etika Politik Islam, prinsip amanah

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

116

Indexed

SINTA 4



tercermin melalui pelaksanaan tanggung jawab kelembagaan, pembagian tugas berdasarkan kompetensi, serta koordinasi dan evaluasi kegiatan. Prinsip keadilan ('*adl*') terlihat melalui keterlibatan masyarakat, pelaku UMKM, relawan, serta unsur seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival, meskipun distribusi manfaat dan tingkat partisipasi masih menunjukkan variasi antar kelompok masyarakat. Sementara itu, prinsip masalah tercermin dalam kontribusi festival terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, promosi daerah, penguatan identitas budaya lokal, serta pengembangan sektor pariwisata. Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya tantangan terkait pemerataan manfaat, keberlanjutan dampak pasca kegiatan, serta dinamika sosial, budaya, dan lingkungan. Secara umum, pengelolaan Festival Krui Pro telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip Etika Politik Islam, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan manfaat, keberlanjutan kebijakan, dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal.

Kata kunci: Dinas Pariwisata, Festival Krui Pro, Etika Politik Islam, Tata Kelola Pariwisata.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berkembang pesat dan berpotensi besar bagi pembangunan daerah. Hampir setiap Negara didunia mencoba mengembangkan industri pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki smber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya budaya (SDB) yang cukup besar untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata (Afriza, 2018). Pariwisata tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami peningkatan visibilitas internasional melalui penyelenggaraan Festival Krui Pro, sebuah kompetisi selancar bertaraf dunia yang berada di bawah naungan *World Surf League* (WSL) melalui Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) dan *Asian Surfing Cooperative* (ASC).

Event Festival Krui Pro meningkatnya perhatian global terhadap Krui Pro menunjukkan bahwa pariwisata berbasis olahraga (*sport tourism*) telah menjadi instrumen strategis dalam memajukan ekonomi wilayah serta memperkenalkan identitas budaya lokal di tingkat global. Kejuaraan *Sport Tourism Surfing* Internasional Krui Pro sudah dimulai dari tahun 2017 di Desa Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Festival Krui Pro dilaksanakan pada bulan Mei-Juni, Festival Krui Pro sudah menjadi ajang festival berkelanjutan sejak di dirikanya hingga saat ini (PEMKAB Pesisir Barat, 2023). Namun demikian, penyelenggaraan event berskala Internasional seperti Krui Pro tidak terlepas dari tantangan tata kelola (*governance*). Dinas Pariwisata memegang peran sentral sebagai instansi pemerintah daerah. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi strategis bagi pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Pesisir Barat melalui penyelenggaraan Festival Krui Pro sebagai ajang berskala internasional yang mempromosikan potensi wisata dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal (Nurhayatun, 2024).

Meskipun Festival Krui Pro telah diselenggarakan secara rutin dan mendapat dukungan pemerintah daerah sebagai event pariwisata bertaraf internasional, dinamika penyelenggaraannya menunjukkan sejumlah persoalan yang relevan dikaji dalam perspektif Etika Politik Islam. Pada aspek amanah, persoalan berkaitan dengan tanggung jawab kelembagaan Dinas Pariwisata, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat pasca festival. Pada aspek keadilan ('*adl*'), persoalan terlihat pada distribusi manfaat ekonomi. Sementara pada aspek masalah, dalam keberlanjutan manfaat sosial serta lingkungan pasca kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola Festival Krui Pro masih memerlukan telaah lebih lanjut untuk memahami sejauh mana nilai-nilai Etika Politik Islam terimplementasi dalam praktik pengelolaannya. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk menganalisis implementasi prinsip amanah, keadilan ('*adl*'), dan masalah dalam pengelolaan Festival Krui Pro. Fokus utama penelitian diarahkan pada peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Festival Krui Pro sebagai salah satu event pariwisata bertaraf internasional yang menjadi ikon daerah, dengan melihat melalui Perspektif Etika Politik serta memberikan

landasan pemahaman bagi peneliti dalam melihat peran lembaga publik dalam pengelolaan event pariwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan bangsa Indonesia (Undang-Undang No. 10 Tahun 2009). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan utama yang mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pariwisata di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Peraturan Daerah tersebut menjelaskan tentang tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pariwisata penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan mengatur standar pariwisata, peran masyarakat, hak dan kewajiban wisatawan menjadi landasan tatakelola pariwisata (Perda No. 3 Tahun 2017).

Dalam kajian Etika Politik Islam, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dinilai dari keberhasilan mencapai tujuan pembangunan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral Islam. Etika Politik Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan ('adl), musyawarah (syura), transparansi, dan maslahah menjadi landasan normatif dalam mengevaluasi kebijakan publik maupun tata kelola pemerintahan. Dalam penelitian ini, teori Etika Politik Islam digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan Festival Krui Pro.

Etika Politik Islam sebagai kerangka normatif yang menawarkan prinsip seperti amanah, keadilan, musyawarah, transparansi serta maslahah. Nilai-nilai Etika Politik Islam tersebut secara historis digunakan dalam tradisi pemerintahan Islam sebagai landasan perilaku moral pemimpin dan lembaga publik (Daulah, 2025). Dalam penelitian ini, Etika Politik Islam digunakan untuk menganalisis praktik tata kelola pariwisata. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian terhadap peran Dinas Pariwisata dalam penyelenggaraan event internasional seperti Festival Krui Pro dapat ditempatkan dalam kerangka Etika Politik Islam sebagai upaya memahami dimensi moral kebijakan publik secara lebih menyeluruh, sekaligus mengkaji keterkaitannya dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat setempat.

Penelitian ini memfokuskan kajian Etika Politik Islam pada prinsip amanah, keadilan dan maslahah sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji tata kelola penyelenggaraan event pariwisata daerah, dengan pertimbangan relevansi konteks kebijakan dan keterjangkauan data penelitian. Pemilihan ketiga prinsip tersebut didasarkan pada relevansinya dengan konteks kebijakan publik, khususnya dalam menilai aspek tanggung jawab institusional, distribusi manfaat, serta orientasi kesejahteraan masyarakat. Adapun prinsip transparansi dan musyawarah tidak menjadi fokus pembahasan karena berkaitan dengan proses internal kebijakan yang berada di luar lingkup kajian penelitian. Kerangka tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai instrumen analisis dalam memahami keterkaitan antara nilai-nilai Etika Politik Islam dengan praktik empiris dalam tata kelola pariwisata daerah. Norma dan nilai tersebut dapat mewarnai perilaku perkembangan kepariwisataan nasional dalam rangka mewujudkan ideologi, politik, ekonomi dan sosial (Badj, 2024). Kerangka diatas memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap praktik tata kelola yang berkembang.

Kajian Terdahulu oleh (Herawati, 2025) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata di Ubud dipengaruhi oleh dinamika politik lokal yang melibatkan pemerintah daerah, elit politik, dan masyarakat adat, melalui strategi kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya pariwisata, distribusi kepentingan ekonomi, serta peran kelembagaan adat dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya lokal. Selanjutnya Penelitian (Mamanto Dkk, 2023) menjelaskan bahwa konflik kepentingan antar aktor lokal memengaruhi arah pengembangan desa wisata melalui tarik-menarik kebijakan, penguasaan sumber daya, serta kepentingan ekonomi dan politik. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pengelolaan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya

peran masyarakat, sehingga pengembangan pariwisata tidak berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kemudian penelitian yang dilakukan (Wijaya, 2025) menjelaskan pengembangan pariwisata dipengaruhi oleh peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan serta pemanfaatan potensi lokal, melalui kebijakan, partisipasi, dan dukungan kelembagaan. Terakhir Penelitian (Solosumantro, 2025) menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata premium perlu didasarkan pada Etika Politik yang menekankan tanggung jawab moral, keadilan, dan keberpihakan pada masyarakat lokal, melalui penguatan nilai etika dalam kebijakan, pengelolaan program pariwisata, pemanfaatan sumber daya secara adil, serta peran kelembagaan yang transparan, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi ekonomi tetapi juga menjaga nilai sosial dan keberlanjutan. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung menitik beratkan pada aspek dinamika politik lokal, konflik kepentingan, peran aktor, serta etika politik dalam pengembangan pariwisata secara parsial, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan pada integrasi sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam satu kerangka yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengembangan pariwisata melalui perspektif nilai-nilai Islam sebagai landasan normatif, sehingga tidak hanya melihat aspek tata kelola dan partisipasi, tetapi juga menekankan pada prinsip etika, keberlanjutan, dan keseimbangan sosial dalam pembangunan pariwisata.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan perspektif Etika Politik Islam dalam analisis tata kelola event pariwisata bertaraf internasional. Padahal, keberhasilan penyelenggaraan suatu event tidak hanya ditentukan oleh efektivitas tata kelola, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai etis, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Urgensi penelitian ini berangkat dari masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas tata kelola pariwisata dalam perspektif Etika Politik Islam, terutama yang menelaah keterkaitan antara tanggung jawab kelembagaan, distribusi manfaat, dan orientasi kemaslahatan dalam pengelolaan event pariwisata. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang akademik untuk mengembangkan kajian yang tidak hanya menempatkan tata kelola pariwisata dalam kerangka administratif dan ekonomis, tetapi juga dalam dimensi normatif yang berbasis nilai. Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonomi baru, dinamika kelembagaan dalam pengelolaan sektor pariwisata menghadirkan kompleksitas tersendiri, khususnya dalam penyelenggaraan Festival Krui Pro sebagai event sport tourism bertaraf internasional. Penyelenggaraan event berskala internasional tersebut menuntut tata kelola yang tidak hanya efektif dan akuntabel, tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik, keadilan distribusi manfaat, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi perspektif Etika Politik Islam ke dalam analisis tata kelola pariwisata, dengan menitikberatkan pada implementasi prinsip amanah, keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (masalah) dalam pengelolaan Festival Krui Pro. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan Etika Politik Islam sebagai kerangka evaluatif dalam *governance*, sekaligus memberikan kontribusi empiris dalam memahami praktik tata kelola pariwisata daerah pada konteks event internasional. Untuk menelaah sejauh mana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan Festival Krui Pro di Tinjau dari Perspektif Etika Politik Islam, penelitian ini menempatkan tata kelola pariwisata sebagai ruang evaluasi terhadap praktik kebijakan publik yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif. Dalam konteks tersebut, tulisan ini akan menjawab bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan Festival Krui Pro sebagai bagian dari tata kelola pariwisata daerah? dan bagaimana implementasi prinsip etika politik Islam yang meliputi amanah, keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (masalah) dalam pengelolaan Festival Krui Pro?

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan Festival Krui Pro sebagai bagian dari tata kelola pariwisata daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip Etika Politik Islam yang meliputi amanah, keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan dalam praktik pengelolaan Festival. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian etika politik Islam dalam konteks tata kelola pariwisata, serta kontribusi

empiris terhadap praktik pengelolaan event pariwisata daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam (Afrizal 2017). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sembilan informan yang terdiri atas Sekretaris Dinas Pariwisata, Bidang Destinasi, Bidang Ekonomi Kreatif, Ketua Panitia Krui Pro, pihak Kecamatan Pesisir Selatan, pelaku UMKM, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat/budaya. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2022). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Festival Krui Pro serta implementasi prinsip amanah, keadilan ('adl), dan masalah dalam perspektif Etika Politik Islam. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, metode, teori, dan peneliti dengan membandingkan informasi antar informan, hasil observasi, dokumentasi, serta penelitian terdahulu sehingga diperoleh data yang valid dan kredibel.

Tabel 1: Data Primer

No.	Nama	Jabatan
1.	Mardiansyah, S.KM	Sekretaris Dinas Pariwisata
2.	Yunia Rahmawati, S.S., M.M	Ketua Bidang Destinasi Dinas Pariwisata
3.	Akbar Muhammad Firqal	Bidang Ekonomi Kreatif Ahli Pertama
4.	Faiq Muhammad Fadholi	Ketua Panitia Krui Pro
5.	Listori, SE. M. M	Kasi Trantib Camat Pesisir Selatan
6.	Qhoirul Kesuma	Pelaku Umkm
7.	Siswanto	Masyarakat yang Paham Pariwisata
8.	Mammud	Tokoh Agama
9.	Merah Banggasawan	Tokoh Adan dan Budaya

Sementara data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain, yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiono, 2013). variabel (Martono, 2010). Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, serta literatur ilmiah yang relevan.

Tabel 2: Data Sekunder

No.	Jenis File	Sumber Data	Keterangan
1.	Dokumen Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009	Regulasi tentang kepariwisataan
2.	Dokumen Hukum (Perda)	No. 3 Tahun 2017	Tentang penyelenggaraan Kepariwisataaan
3.	Website Resmi	Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat	Informasi tambahan

Untuk memastikan keabsahan data dan hasil penelitian, dilakukan pemeriksaan data dengan menggunakan teknik dari 4 sisi triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti: Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu Sekretaris Dinas Pariwisata, Bidang Destinasi, Bidang Ekonomi Kreatif, Ketua Panitia Krui Pro, pihak Kecamatan Pesisir Selatan, pelaku UMKM, masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat/budaya. Perbandingan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh kesesuaian informasi mengenai pengelolaan Festival Krui Pro sehingga data yang diperoleh memiliki

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

Kedua, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil wawancara dikonfirmasi melalui pengamatan langsung di lapangan serta berbagai dokumen pendukung, seperti dokumen hukum, data penyelenggaraan Festival Krui Pro, publikasi resmi, dan informasi pada website Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. Penggunaan berbagai metode tersebut bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

Ketiga, triangulasi teori dilakukan dengan menafsirkan temuan penelitian menggunakan perspektif Etika Politik Islam sebagai kerangka utama analisis, khususnya melalui prinsip amanah, keadilan ('*adl*'), dan kemaslahatan (*maslahah*).

Keempat, triangulasi peneliti yaitu hasil penelitian dibandingkan dengan berbagai penelitian terdahulu yang membahas tata kelola pariwisata, partisipasi masyarakat, dan dampak penyelenggaraan event pariwisata sehingga diperoleh kesesuaian maupun perbedaan temuan secara lebih objektif.

PEMBAHASAN

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan Festival Krui Pro, khususnya dalam aspek promosi, koordinasi, serta evaluasi kegiatan pariwisata berskala internasional. Dalam struktur kelembagaan, Kepala Dinas memimpin pelaksanaan fungsi tersebut dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Posisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Festival Krui Pro tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga berada dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang terstruktur. Adapun visi dan misi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yaitu, Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani, dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan". Misi utamanya berfokus pada pengembangan destinasi pariwisata unggulan, peningkatan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata. Untuk mencapai visi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Pengembangan Destinasi: Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan yang berdaya saing internasional.
2. Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi sektor pariwisata.
3. Infrastruktur Berkelanjutan: Membangun sarana prasarana yang tangguh bencana dan berwawasan lingkungan.
4. Perkembangan/memajukan Budaya Lokal
5. Pelestarian Budaya Lokal

Dalam implementasinya, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berperan dalam berbagai aspek pengelolaan Festival Krui Pro, antara lain melalui koordinasi dengan pihak penyelenggara, fasilitasi kebutuhan teknis kegiatan, serta penguatan promosi melalui berbagai media. Selain itu, dinas juga terlibat dalam pengaturan dukungan infrastruktur, pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari siklus kebijakan pariwisata daerah. Peran tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam tata kelola event pariwisata berskala internasional. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan tersebut menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam kerangka etika politik Islam, khususnya dalam melihat bagaimana tanggung jawab kelembagaan (*amanah*), distribusi peran dan manfaat (*keadilan*), serta orientasi pada kesejahteraan masyarakat (*maslahah*) diimplementasikan dalam praktik pengelolaan Festival Krui Pro. Pemahaman terhadap peran dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan Festival Krui Pro menjadi landasan penting untuk menelaah lebih lanjut bagaimana nilai-nilai etika politik Islam diimplementasikan dalam praktik tata kelola pariwisata daerah.

Posisi Strategis Festival Krui Pro dalam Pengembangan Pariwisata Daerah. Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan potensi sumber daya alamnya, khususnya kawasan pesisir, sebagai daya tarik dalam pengembangan pariwisata. Dalam upaya meningkatkan promosi dan

menarik kembali kunjungan wisatawan mancanegara, pemerintah daerah mengembangkan strategi berbasis *sport tourism* melalui penyelenggaraan event olahraga yang terintegrasi dengan promosi destinasi wisata. Salah satu bentuk implementasi strategi tersebut adalah penyelenggaraan kejuaraan selancar internasional Krui Pro, yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan *World Surf League* serta didukung oleh Persatuan Selancar Ombak Indonesia dan *Asian Surfing Cooperative*. Kegiatan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017 dengan kategori *Men's* dan *Women's QS1000*, yang diikuti oleh sekitar 81 peserta dari berbagai negara (PEMKAB Pesisir Barat, 2023). Secara geografis, Festival Krui Pro berlokasi di Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, dengan pusat kegiatan di kawasan Hotel Ombak Indah Resort. Pelaksanaan festival berlangsung selama 5 hingga 7 hari, dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca. Dalam situasi tertentu, apabila kondisi gelombang di lokasi utama tidak memungkinkan, kegiatan dapat dialihkan ke lokasi alternatif di wilayah yang masih berada dalam kawasan Pesisir Barat.

Akbar Muhammad Firqal selaku bidang Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa Festival Krui Pro pada awalnya tumbuh dari inisiatif komunitas lokal dan wisatawan mancanegara yang memiliki ketertarikan terhadap potensi ombak di wilayah tersebut. Seiring waktu, pemerintah daerah mulai terlibat secara aktif sekitar tahun 2014, yang kemudian diikuti oleh keterlibatan pemerintah pusat serta lembaga internasional seperti *World Surf League* (Firqal, 2026). Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya transformasi pengelolaan dari berbasis komunitas menuju tata kelola yang lebih terstruktur dan kolaboratif. Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran dari inisiatif berbasis komunitas menuju model *multi-stakeholder governance*, yang menekankan kolaborasi antara aktor lokal, nasional, dan internasional dalam pengembangan pariwisata daerah. Data empiris Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan bahwa jumlah peserta dan keterlibatan negara dalam Festival Krui Pro cenderung stabil dengan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan Jumlah Peserta dan Negara Festival Krui Pro (2022–2025), Gambaran dinamika partisipasi tersebut disajikan pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 3: Dinamika Partisipasi

No.	Tahun	Jumlah	Negara
1.	2022	218 Peserta	17 Negara
2.	2023	294 Peserta	14 Negara
3.	2024	262 Peserta	16 Negara
4.	2025	257 Peserta	17 Negara

Sumber data diperoleh dari Dinas Pariwisata tahun 2025

Data empiris menunjukkan bahwa partisipasi dalam Festival Krui Pro cenderung stabil dengan fluktuasi yang masih berada pada kisaran relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa festival tersebut memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam konteks *sport tourism* internasional serta berkontribusi terhadap peningkatan visibilitas Kabupaten Pesisir Barat di tingkat global. Selain itu, tingginya partisipasi tersebut juga menunjukkan adanya peran aktif Dinas Pariwisata dalam mengelola kegiatan berskala internasional melalui koordinasi kelembagaan dan pengelolaan sumber daya yang terstruktur. Pariwisata tidak hanya dipahami sebagai upaya peningkatan kunjungan wisata, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan bahkan politik (Zarotis & Zarotis, 2021). Dalam perspektif etika politik Islam, fenomena ini dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi prinsip kemaslahatan (maslahah), khususnya dalam menghadirkan manfaat ekonomi dan promosi daerah. Namun demikian, dalam kerangka yang lebih luas, peningkatan partisipasi tersebut juga memerlukan pengelolaan yang berorientasi pada pemerataan manfaat agar selaras dengan prinsip keadilan ('adl) serta penguatan tanggung jawab institusional sebagai bentuk amanah dalam tata kelola publik.

Dalam pengembangan Pariwisata dibutuhkan berbagai strategi maupun program dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah yang terkandung didalamnya. Pengembangan Pariwisata merupakan proses jangka panjang dan berkelanjutan, kompleks dan terkait dengan berbagai aspek (Medan, 2021). Perencanaan pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan cermat agar memberikan manfaat

ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat. Dampak sosial budaya dari perkembangan pariwisata bersifat positif yang akan memberikan keuntungan. Keuntungan yang diberikan seperti Pengetahuan dan wawasan masyarakat setempat meningkat, Masyarakat semakin sadar akan kekayaan budayanya, Status sosial masyarakat meningkat, Kebudayaan setempat menjadi berkembang (K. K. Dkk, 2024). Posisi strategis Festival Krui Pro tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada perannya sebagai media integrasi antara kepentingan ekonomi, promosi daerah, dan penguatan identitas lokal. Merah Bangsawan selaku tokoh adat dan budaya menyampaikan bahwa: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat telah berupaya memperkenalkan identitas daerah melalui berbagai unsur budaya yang ditampilkan dalam rangkaian Festival Krui Pro. Upaya tersebut terlihat melalui pengenalan kuliner khas daerah, tradisi Ngantak Pahakh sebagai simbol kebersamaan masyarakat, serta pertunjukan seni budaya seperti Tari Menyuncun Pahakh dan tari kolosal bertema damar yang merepresentasikan kehidupan masyarakat Krui. Selain itu, festival juga menampilkan busana adat khas Pesisir Barat seperti Injang Pugung dan Selendang Miwang, serta memperkenalkan berbagai kuliner tradisional berbahan dasar ikan tuhuk (marlin) sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal (Bangsawan, 2026). Pengelolaan festival ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi nilai, termasuk dalam perspektif etika politik Islam yang menjadi fokus penelitian.

Peran Dinas Pariwisata dalam Kerangka Tata Kelola Festival Krui Pro

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, pada indikator kewenangan dapat dipahami bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat menjalankan perannya dalam pengelolaan Festival Krui Pro melalui berbagai fungsi strategis yang mencakup perumusan kebijakan, penyediaan fasilitas pendukung, serta pengembangan sektor kepariwisataan secara menyeluruh. Peran tersebut meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta penguatan sektor ekonomi kreatif. Secara umum, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dipandang berjalan secara relatif efektif dan terkoordinasi. Akbar Muhammad Firqal selaku bidang Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa: dalam praktiknya, terdapat pembagian peran yang cukup jelas antara Dinas Pariwisata dan pihak eksternal yang terlibat dalam penyelenggaraan festival. Dinas Pariwisata tetap memegang kendali utama dalam aspek non-teknis pertandingan, seperti penyediaan anggaran, konsumsi, pengelolaan petugas lapangan, pelaksanaan kegiatan seremonial, pengamanan, serta perizinan kegiatan. Sementara itu, aspek teknis pertandingan, termasuk penilaian (*judging*) dan pengelolaan atlet, dikelola oleh organisasi profesional internasional seperti *World Surf League*, serta didukung oleh *Asian Surfing Cooperative* dan Persatuan Selancar Ombak Indonesia.

Dinas Pariwisata juga berperan dalam mendukung aspek promosi dan pelayanan wisata, termasuk pengelolaan akomodasi, penyediaan fasilitas tempat tinggal, konsumsi, transportasi, aksesibilitas, serta kegiatan publikasi dan periklanan. Peran ini menunjukkan adanya upaya integratif dalam menghubungkan penyelenggaraan event dengan pengembangan ekosistem pariwisata daerah secara lebih luas (Firqal, 2026). Dari temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan Festival Krui Pro tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan pola tata kelola kolaboratif yang melibatkan aktor lokal dan internasional. Pembagian kewenangan ini berpotensi memperkuat profesionalisme penyelenggaraan, sekaligus membuka ruang bagi optimalisasi peran pemerintah daerah dalam aspek yang bersifat strategis dan kontekstual. Pola pembagian kewenangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *collaborative governance*, di mana pemerintah daerah tidak berperan secara dominan dalam seluruh aspek, tetapi lebih pada penguatan fungsi fasilitatif dan regulatif dalam ekosistem pariwisata.

Yunia Rahmawati, Ketua Bidang Destinasi menjelaskan bahwa: peran bidang destinasi dalam penyelenggaraan Festival Krui Pro dapat dipahami sebagai koordinator teknis di lapangan, khususnya dalam penyiapan kawasan destinasi. Peran ini mencakup pengaturan ruang kegiatan, kesiapan infrastruktur pendukung, serta pemantauan kondisi lapangan selama acara berlangsung. Bidang destinasi tidak hanya

berfungsi pada tahap persiapan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses monitoring untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, bidang destinasi melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Koordinasi tersebut juga melibatkan pihak penyelenggara internasional seperti *World Surf League* serta organisasi nasional Persatuan Selancar Ombak Indonesia. Selain itu, keterlibatan aktor lokal seperti peratin Pekon Tanjung Setia, Camat Pesisir Selatan, serta aparat keamanan menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat inklusif dalam pengelolaan kegiatan. Lebih lanjut, koordinasi juga dilakukan dengan pelaku usaha lokal, seperti pengelola penginapan dan rumah makan di sekitar lokasi kegiatan. Hal ini mencerminkan adanya upaya integrasi antara penyelenggaraan event dengan kesiapan sektor pendukung pariwisata, sehingga kegiatan tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi lokal.

Proses koordinasi tersebut berlangsung secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan dan persiapan, pelaksanaan kegiatan, hingga tahap evaluasi pasca kegiatan. Pola koordinasi yang digunakan cenderung bersifat langsung melalui pertemuan tatap muka, yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih efektif antar pihak yang terlibat (Rahmawati, 2026). Secara keseluruhan, peran bidang destinasi dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme tata kelola kolaboratif yang menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan. Pola ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Festival Krui Pro tidak hanya ditentukan oleh satu aktor, melainkan oleh keterpaduan peran berbagai pihak dalam suatu sistem yang terkoordinasi. Pola koordinasi yang dilakukan secara lintas level pemerintahan dan melibatkan masyarakat lokal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk praktik *collaborative governance*, yang menekankan pentingnya sinergi antara aktor formal dan informal dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Kerjasama antar Pemerintah daerah, pengelola festival, pihak swasta terkait dan masyarakat sekitar dibutuhkan dalam rangka perbaikan aspek amenities guna mengembangkan destinasi wisata yang berdaya saing dan manfaat pembangunan dapat berdampak pada semua pihak (Kholili et al., 2024).

Analisis Pengelolaan Festival Krui Pro dalam Perspektif Etika Politik Islam

Pengelolaan Festival Krui Pro dapat dianalisis tidak hanya dari aspek administratif dan teknis, tetapi juga melalui kerangka normatif yang menekankan nilai-nilai etika dalam tata kelola publik. Perspektif etika politik Islam menawarkan pendekatan yang menempatkan nilai moral sebagai landasan dalam pelaksanaan kewenangan, khususnya dalam konteks pengelolaan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Dalam hal ini, Nilai Etika Politik Islam amanah, keadilan, serta masalah menjadi relevan untuk memahami praktik pengelolaan festival secara lebih komprehensif. Berdasarkan Ayat Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 58 menjadi dasar normatif untuk penelitian ini:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan penyerahan kembali kunci Ka'bah pada masa penaklukan Makkah, ketika otoritas penjagaan Ka'bah berpindah dari pemegang lama kepada pemimpin baru. Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah bukan sekedar tanggung jawab individu semata, tetapi mencakup jabatan, kekuasaan, dan kewenangan publik sehingga penyerahan amanah kepada yang berhak adalah prasyarat sah bagi legitimasi kepemimpinan. Dalam hal ini, amanah menjadi landasan legitimasi pemerintahan yang benar; dan adil dalam pengambilan keputusan merupakan indikator bahwa amanah itu dijalankan secara benar. Ayat diatas menegaskan bahwa

setiap lembaga publik atau pejabat yang memegang amanah harus bersikap adil dan bertanggung jawab sebagai aspek yang penting bagi analisis etika politik dalam tata kelola publik (Administrator, 2023).

Relevansinya Surah An-Nisa ayat 58 diatas dengan penelitian ini bahwa lembaga pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata yang mengelola event Festival Krui Pro memikul amanah publik. Amanah itu mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat baik dalam distribusi manfaat, pelaksanaan kebijakan, maupun keadilan pelayanan. Ayat ini menjadi dasar moral dan spiritual bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Analisis pengelolaan Festival Krui Pro, perspektif etika politik Islam dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk memahami bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dijalankan dalam praktik. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara nilai-nilai etis dengan pelaksanaan kebijakan publik, yang selanjutnya dapat ditelaah melalui beberapa prinsip utama.

Amanah sebagai Prinsip Tanggung Jawab Institusional

Perspektif etika politik Islam, amanah dipahami sebagai tanggung jawab institusional dalam menjalankan kewenangan secara profesional dan berorientasi pada kepentingan publik. Pengelolaan pariwisata pada dasarnya melibatkan berbagai aktor serta menekankan pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, sehingga menuntut adanya tanggung jawab institusional yang terstruktur (Bock & Rodrigues, 2021). Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam pengelolaan Festival Krui Pro dapat dianalisis melalui bagaimana tanggung jawab tersebut diimplementasikan dalam praktik. Faiq Muhammad Fadholi Ketua Panitia Festival Krui Pro menjelaskan bahwa: pembagian tugas dalam penyelenggaraan Festival Krui Pro dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan individu, sehingga setiap personel ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya penempatan tanggung jawab secara proporsional sebagai bagian dari prinsip amanah. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui rekrutmen panitia dan relawan yang bersifat terbuka, dengan proses seleksi berdasarkan *curriculum vitae* dan pengalaman, mencerminkan upaya pengelolaan sumber daya manusia yang terstruktur dan akuntabel.

Penempatan personel berdasarkan kompetensi menunjukkan bahwa prinsip amanah juga tercermin dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dalam tata kelola pariwisata, kualitas SDM menjadi faktor penting karena berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan. Oleh karena itu, proses rekrutmen yang mempertimbangkan pengalaman dan kemampuan individu dapat dipahami sebagai upaya menempatkan tanggung jawab kepada pihak yang memiliki kompetensi yang sesuai. Selain itu, sebelum kegiatan berlangsung, panitia dan relawan memperoleh pembinaan serta pengarahan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap kesiapan SDM agar setiap personel memahami perannya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan. Dalam perspektif etika politik Islam, pembinaan tersebut mencerminkan tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan bahwa amanah tidak hanya diberikan kepada individu yang tepat, tetapi juga didukung melalui proses pembekalan yang memadai sehingga tugas dapat dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. (Fadholi, 2026).

Akbar Muhammad Firqal selaku bidang Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa: Dalam aspek pertanggung jawaban, setelah kegiatan berlangsung dilakukan pengumpulan data dan evaluasi dari setiap bidang yang kemudian dihimpun dalam laporan terpadu. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan, yang sejalan dengan nilai amanah dalam tata kelola publik. Adapun indikator keberhasilan kegiatan yang dipahami melalui kelancaran pelaksanaan serta adanya kunjungan ulang wisatawan menunjukkan orientasi pada keberlanjutan manfaat (Firqal, 2026). Meskipun keterbukaan informasi anggaran merupakan salah satu unsur yang relevan dalam menilai akuntabilitas kelembagaan, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh data terkait rincian anggaran penyelenggaraan Festival Krui Pro. Dengan demikian, analisis prinsip amanah difokuskan pada aspek tanggung jawab kelembagaan yang dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara para informan, meliputi

pembagian peran, koordinasi pelaksanaan kegiatan, serta mekanisme evaluasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Festival Krui Pro.

Mahmud selaku Tokoh agama menyampaikan bahwa: penyelenggaraan Festival Krui Pro secara umum telah berjalan dengan baik dari aspek pelaksanaan. Hal tersebut terlihat dari adanya perencanaan yang terstruktur, koordinasi antar pihak terkait, serta keterlibatan berbagai unsur dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya Dinas Pariwisata dalam menjalankan tanggung jawab kelembagaan sesuai dengan tugas yang diemban. Meskipun demikian, tokoh agama menilai bahwa evaluasi kegiatan perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan selama festival berlangsung, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat (Mahmud, 2026).

Dalam perspektif etika politik Islam, amanah tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan kegiatan sesuai rencana, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan manfaat yang dihasilkan. Indikasi keberlanjutan tersebut terlihat dari adanya kunjungan ulang wisatawan yang kembali memanfaatkan akomodasi lokal di luar periode festival, khususnya pada sektor homestay. Selain itu, festival juga menjadi sarana promosi budaya daerah melalui pengenalan tradisi, kesenian, dan kuliner khas Pesisir Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat Festival Krui Pro tidak sepenuhnya berhenti pada saat kegiatan berlangsung. Meskipun dampaknya belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat lokal, kegiatan ini menunjukkan adanya potensi keberlanjutan manfaat, terutama pada sektor pariwisata dan promosi budaya daerah yang dapat terus dikembangkan melalui pengelolaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Implementasi prinsip amanah melalui pembagian tugas berdasarkan kompetensi, koordinasi antaraktor, dan evaluasi kegiatan menunjukkan adanya upaya pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional dalam penyelenggaraan Festival Krui Pro. Praktik tersebut mencerminkan tanggung jawab kelembagaan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diemban. Selain mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, mekanisme tersebut juga berpotensi menjadi landasan bagi pengembangan pariwisata daerah yang lebih berkelanjutan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang terlibat.

Berdasarkan temuan penelitian, prinsip amanah dalam pengelolaan Festival Krui Pro tercermin melalui upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dalam menjalankan tanggung jawab kelembagaan secara terstruktur, mulai dari penempatan personel berdasarkan kompetensi, pembinaan sumber daya manusia, koordinasi pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi pascakegiatan. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan kewenangan secara profesional sesuai dengan tugas yang diemban. Meskipun demikian, penguatan terhadap pemerataan manfaat dan keberlanjutan dampak kegiatan masih diperlukan agar pelaksanaan Festival Krui Pro tidak hanya berhasil dari aspek penyelenggaraan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

‘Adl (Keadilan) dalam Distribusi Akses dan Manfaat

Perspektif etika politik Islam, prinsip ‘adl (keadilan) menekankan pentingnya distribusi akses dan manfaat yang proporsional dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan sektor pariwisata. Pengelolaan Festival Krui Pro oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dapat dianalisis melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan ruang partisipasi dan manfaat bagi masyarakat lokal. Listori, Camat Pesisir Selatan menjelaskan bahwa: keterlibatan masyarakat terlihat melalui partisipasi aktif pelaku UMKM, di mana setiap desa/pekon di wilayah Krui diberikan kesempatan untuk menampilkan produk lokal melalui stan atau bazar kuliner. Kegiatan ini memungkinkan berbagai potensi ekonomi lokal untuk dikenal oleh wisatawan, sekaligus memperkenalkan kekhasan kuliner daerah Pesisir Barat, seperti buak tat, bebat, pandam, dan serabi khas Krui (Listori, 2026).

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya variasi persepsi terkait dampak ekonomi Festival Krui Pro. Qhoirul Kesuma pelaku UMKM menyampaikan bahwa: kegiatan tersebut belum secara signifikan mengubah kondisi ekonomi masyarakat setempat, karena sebagian besar kebutuhan peserta, seperti

akomodasi, konsumsi, dan transportasi, telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara (Kesuma, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku ekonomi lokal. Dalam perspektif etika politik Islam, kondisi ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika distribusi manfaat yang masih memerlukan penguatan agar prinsip keadilan ('*adl*') dapat terwujud secara lebih luas.

Dalam perspektif etika politik Islam, prinsip keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian akses partisipasi, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memperoleh manfaat secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara, dukungan yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam penyelenggaraan Festival Krui Pro lebih banyak diwujudkan melalui penyediaan stan atau tempat berjualan tanpa pemungutan biaya, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mempromosikan dan memasarkan produk lokal kepada wisatawan. Meskipun kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya membuka akses partisipasi ekonomi bagi masyarakat, penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan, pendampingan usaha, maupun pengembangan kualitas produk masih menjadi aspek yang dapat ditingkatkan. Upaya tersebut penting untuk memperluas peluang pelaku usaha lokal dalam memanfaatkan momentum Festival Krui Pro secara lebih optimal sehingga distribusi manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain distribusi manfaat ekonomi, prinsip keadilan juga dapat dilihat dari kesempatan masyarakat untuk terlibat dan memperoleh pengalaman dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Berbeda dengan pelaku UMKM yang dalam penelitian ini belum memperoleh pelatihan atau pendampingan khusus, sedangkan panitia dan relawan lokal mendapatkan pembinaan serta pengarahan sebelum kegiatan berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang partisipasi bagi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Festival Krui Pro. Keterlibatan tersebut tidak hanya memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan berskala internasional, tetapi juga memberikan pengalaman yang dapat mendukung penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Dalam perspektif etika politik Islam, kesempatan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari distribusi manfaat non-ekonomi yang mencerminkan prinsip keadilan melalui pemberian akses partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, prinsip keadilan ('*adl*') dalam pengelolaan Festival Krui Pro tercermin melalui pemberian akses partisipasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk keterlibatan pelaku UMKM maupun partisipasi panitia dan relawan lokal dalam penyelenggaraan kegiatan. Selain memberikan peluang ekonomi melalui penyediaan ruang promosi dan pemasaran produk lokal, festival juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengalaman serta keterlibatan dalam kegiatan pariwisata berskala internasional. Meskipun demikian, distribusi manfaat yang dihasilkan masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan pemerataan manfaat ekonomi, sehingga prinsip keadilan tidak hanya terwujud dalam akses partisipasi, tetapi juga dalam kesempatan memperoleh manfaat yang lebih proporsional dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Masalah sebagai Orientasi Kesejahteraan Kolektif

Perspektif etika politik Islam, masalah dipahami sebagai orientasi kebijakan yang bertujuan menghadirkan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan Festival Krui Pro oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata daerah. Berdasarkan temuan lapangan, kegiatan festival memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan aktivitas UMKM, penyediaan jasa kuliner, serta peningkatan penggunaan akomodasi seperti homestay oleh wisatawan. Selain itu, festival juga berkontribusi dalam memperkenalkan potensi lokal dan memperluas eksposur daerah di tingkat nasional maupun internasional. Posisi Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan Krui Pro memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya pada sektor akomodasi (Nova, 2023). Namun dalam perspektif yang lebih luas, manfaat Festival Krui Pro tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga

pelestarian budaya lokal. Merah Bangsawan selaku tokoh adat dan budaya menyampaikan bahwa: promosi budaya daerah masih dapat diperkuat melalui pengenalan yang lebih luas terhadap tradisi masyarakat Sai Batin seperti Muayak dan Hehiwang yang merupakan bentuk sastra lisan khas Pesisir Barat. Selain itu, edukasi mengenai proses pembuatan kain tradisional serta pengenalan Lamban Balak sebagai rumah adat masyarakat setempat dinilai penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada wisatawan mengenai kekayaan budaya daerah. Dengan demikian, citra Kabupaten Pesisir Barat tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata selancar, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki warisan budaya dan tradisi yang khas (Bangsawan, 2026).

Faiq Muhammad Fadholi Ketua Panitia Festival Krui Pro menjelaskan bahwa: dampak berkelanjutan dari Festival Krui Pro terhadap masyarakat secara umum dinilai belum sepenuhnya terbentuk. Manfaat yang lebih nyata sejauh ini lebih dirasakan oleh sektor akomodasi, terutama homestay, yang mengalami kunjungan ulang dari peserta di luar periode festival. Temuan ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terdistribusi secara luas. Dalam perspektif etika politik Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi kemaslahatan telah mulai terbentuk, namun aspek keberlanjutan dan perluasan manfaat masih menjadi ruang penguatan dalam pengelolaan pariwisata daerah (Fadholi, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Festival Krui Pro telah mengarah pada penciptaan kemaslahatan kolektif, khususnya dalam bentuk manfaat ekonomi dan penguatan identitas lokal. Namun demikian, dalam perspektif masalah yang lebih komprehensif, penguatan pada aspek keberlanjutan dan pemerataan manfaat tetap menjadi hal yang dapat terus dikembangkan.

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya perspektif kritis dari masyarakat lokal. Siswanto, selaku Masyarakat Tanjung Setia menjelaskan bahwa: selama pelaksanaan Festival Krui Pro, manfaat ekonomi belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar. Selain itu, pasca kegiatan masih ditemukan persoalan lingkungan berupa peningkatan volume sampah di kawasan pesisir. Informan juga menilai bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan festival masih belum optimal. Dalam konteks tersebut, masyarakat menyampaikan harapan agar pengelolaan fasilitas pendukung, seperti penyediaan tempat sampah di sepanjang kawasan pantai, dapat lebih diperhatikan oleh Dinas Pariwisata (Siswanto, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi kemaslahatan dalam pengelolaan Festival Krui Pro tidak hanya berkaitan dengan manfaat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek partisipasi sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab publik.

Mahmud selaku tokoh agama menyampaikan bahwa: meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Menurutnya, kehadiran wisatawan asing mendorong peningkatan kemampuan berbahasa asing masyarakat, tumbuhnya kepedulian terhadap lingkungan, serta meningkatnya minat generasi muda terhadap olahraga selancar. Namun demikian, terdapat pula tantangan berupa potensi pergeseran nilai sosial, perbedaan pola berpakaian yang tidak selalu selaras dengan norma lokal, munculnya kecenderungan gaya hidup konsumtif, serta perubahan pemanfaatan ruang pesisir akibat berkembangnya fasilitas pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu diarahkan agar tetap sejalan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat (Mahmud, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan dalam perspektif etika politik Islam tidak hanya diukur dari manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan kebijakan pariwisata dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan keberlangsungan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (Rosy Febriani Daud, 2022). Temuan yang menunjukkan adanya manfaat ekonomi di satu sisi dan keterbatasan dampak langsung pada sebagian masyarakat di sisi lain dapat dipahami sebagai karakter distribusi manfaat yang bersifat sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa Festival Krui Pro telah menghasilkan kemaslahatan ekonomi, namun manfaat tersebut masih lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, terutama akomodasi dan jasa pendukung wisata. Orientasi masalah dalam

pengelolaan festival telah terbentuk, tetapi perlu diperluas agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih inklusif oleh masyarakat lokal secara keseluruhan. Berdasarkan temuan penelitian, prinsip masalah dalam pengelolaan Festival Krui Pro tercermin melalui upaya menghadirkan manfaat pada aspek pariwisata, promosi daerah, dan pelestarian budaya lokal. Festival ini berkontribusi dalam meningkatkan eksposur Kabupaten Pesisir Barat di tingkat nasional maupun internasional serta membuka peluang ekonomi pada sektor-sektor tertentu, khususnya akomodasi dan jasa pendukung wisata. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat lokal. Selain itu, masih terdapat tantangan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan dampak sosial budaya. Oleh karena itu, penguatan terhadap pemerataan manfaat dan pengelolaan dampak kegiatan menjadi penting agar kemaslahatan yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Pengelolaan pariwisata dalam konteks Festival Krui Pro dapat dipahami tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi maupun instrumen promosi destinasi, tetapi juga sebagai ruang praktik nilai-nilai etika dalam kebijakan publik. Dalam konteks etika publik, pengelolaan pariwisata idealnya tetap memperhatikan nilai-nilai normatif, sebagaimana ditegaskan bahwa kepariwisataan harus menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya (Amrina et al., 2021). Dalam perspektif etika politik Islam, kebijakan publik tidak semata berorientasi pada capaian hasil, melainkan juga pada proses yang mencerminkan prinsip amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah) dalam pelaksanaannya. Ruang publik, secara konseptual, bukan hanya sebatas ruang fisik yang dapat diakses bersama. Ia juga merupakan arena sosial, simbolik, dan politis tempat warga membangun identitas, memperkuat relasi, dan menyatakan klaim atas keberadaan mereka (Nuraini et al., 2025).

Pengelolaan Festival Krui Pro menunjukkan bahwa pariwisata dapat berfungsi sebagai medium yang mempertemukan kepentingan ekonomi, sosial, dan nilai etis dalam satu ruang praktik yang dinamis. Keterlibatan multi-aktor, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan aktor internasional, mengindikasikan bahwa proses pengelolaan tidak berlangsung secara tunggal, melainkan melalui interaksi yang membentuk pola tata kelola kolaboratif. Pola ini mengindikasikan bahwa pariwisata berfungsi sebagai ruang interaksi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan nilai-nilai normatif. Dengan adanya ruang etika publik dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Melihat dari proses ini menciptakan dasar yang legitim bagi kerja sama sosial, pengambilan keputusan kolektif, dan penyelesaian konflik yang adil (Rizqian, 2025).

Pada praktiknya, keterlibatan masyarakat melalui aktivitas ekonomi lokal serta mekanisme distribusi manfaat dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari upaya menghadirkan keadilan dan kemaslahatan secara kolektif. Sementara itu, pembagian tugas, koordinasi lintas aktor, serta mekanisme evaluasi mencerminkan adanya dimensi tanggung jawab institusional dalam pengelolaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek etis tidak terpisah dari praktik teknis, melainkan melekat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Mardiansyah selaku Sekretaris Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa: adanya upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dalam ruang publik, seperti kehadiran tokoh agama dalam pembukaan kegiatan.

Karakteristik festival sebagai ajang olahraga internasional mendorong adanya penyesuaian terhadap norma yang berlaku secara lebih luas, khususnya dalam aspek berpakaian, yang lebih ditekankan pada norma kesopanan (Mardiansyah, 2026). Kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi nilai antara konteks lokal dan dinamika global dalam praktik pariwisata. Meskipun demikian, refleksi ini juga menunjukkan bahwa penguatan pada aspek pemerataan manfaat dan keberlanjutan kebijakan tetap menjadi penting agar nilai-nilai etika tersebut dapat terwujud secara lebih komprehensif.

Temuan dan Kendala dalam Perspektif Etika Politik Islam. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Festival Krui Pro secara umum telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip amanah, keadilan ('adl), dan maslahah. Keselarasan tersebut terlihat dari pelaksanaan tugas kelembagaan, pemberian manfaat bagi masyarakat, serta upaya pengembangan pariwisata daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa

aspek yang memerlukan penguatan, terutama terkait pemerataan manfaat ekonomi, keberlanjutan dampak pasca kegiatan, serta optimalisasi promosi dan pelestarian budaya lokal.

Dalam perspektif amanah, Dinas Pariwisata telah melaksanakan tanggung jawab kelembagaan melalui perencanaan, koordinasi, dan penyelenggaraan festival secara terstruktur serta melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, aspek evaluasi dan keberlanjutan manfaat pasca kegiatan masih memerlukan penguatan agar tanggung jawab publik tidak hanya berorientasi pada keberhasilan penyelenggaraan acara, tetapi juga pada dampak jangka panjang bagi masyarakat. Perspektif keadilan ('adl), akses partisipasi masyarakat telah difasilitasi melalui keterlibatan pelaku UMKM, relawan, komunitas lokal, serta unsur seni dan budaya dalam rangkaian kegiatan Festival Krui Pro. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan dan manfaat yang diperoleh masih bervariasi antar kelompok masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi manfaat dan kesempatan partisipasi belum sepenuhnya dirasakan secara merata, sehingga upaya pemerataan masih dapat terus diperkuat. Sementara itu, dalam perspektif masalah, Festival Krui Pro telah memberikan manfaat pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Manfaat tersebut terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, promosi daerah, pengenalan budaya lokal, serta tumbuhnya minat masyarakat terhadap sektor pariwisata. Di sisi lain, temuan penelitian juga menunjukkan adanya berbagai dinamika sosial dan budaya yang muncul sebagai konsekuensi perkembangan pariwisata internasional. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dihasilkan dapat dikatakan telah terwujud, namun masih memerlukan penguatan agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih merata, berkelanjutan, dan tetap selaras dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat memiliki peran strategis dalam pengelolaan Festival Krui Pro sebagai bagian dari tata kelola pariwisata daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, promosi, dan evaluasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, panitia penyelenggara, pelaku usaha, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Festival Krui Pro tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan praktik tata kelola pariwisata yang kolaboratif.

Dalam perspektif Etika Politik Islam, pengelolaan Festival Krui Pro secara umum telah menunjukkan implementasi prinsip amanah, keadilan ('adl), dan masalah. Prinsip amanah tercermin melalui pelaksanaan tanggung jawab kelembagaan, pembagian tugas berdasarkan kompetensi, koordinasi lintas pihak, serta pelaksanaan evaluasi kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Prinsip keadilan ('adl) terlihat melalui pemberian akses partisipasi kepada masyarakat, pelaku UMKM, relawan, dan unsur seni budaya dalam rangkaian kegiatan festival. Namun demikian, manfaat yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat, sehingga distribusi manfaat masih menunjukkan karakter yang bersifat diferensial. Prinsip masalah tercermin dalam kontribusi Festival Krui Pro terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal, promosi daerah, penguatan identitas budaya, serta peningkatan eksposur pariwisata Kabupaten Pesisir Barat di tingkat nasional dan internasional. Di sisi lain, perkembangan pariwisata internasional juga menghadirkan berbagai dinamika sosial, budaya, dan lingkungan yang memerlukan perhatian dalam proses pengelolaannya. Secara keseluruhan, terdapat keselarasan antara prinsip-prinsip Etika Politik Islam dengan praktik empiris dalam pengelolaan Festival Krui Pro. Keselarasan tersebut terlihat pada upaya mewujudkan tanggung jawab kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan orientasi kemanfaatan publik dalam tata kelola festival. Meskipun demikian, penguatan terhadap pemerataan manfaat, keberlanjutan dampak pasca kegiatan, serta optimalisasi pelestarian nilai sosial dan budaya lokal tetap diperlukan agar implementasi prinsip amanah, keadilan ('adl), dan masalah dapat terwujud secara lebih komprehensif dalam pengelolaan pariwisata daerah.

REFERENSI

- 2009, U.-U. N. 10 T. (2014). *Undang-Undang No. 10 Tahun 2009*.
- 2017, P. N. 3 T. (2017). *Bupati pesisir barat provinsi lampung*. 1–12.
- Administrator. (2023). Tafsir Al-Mishbah Melangkah ke Era Digital: Mendalami Makna Ayat Al-Qur'an Melalui Aplikasi. In *Lenterahati.Com*.
- Afriza, S. (2018). Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata. In *Bandung. PT. Refika Aditama*.
- Amrina, D. H., Septiana, R., Alawiyah, T., & Zainal, R. (2021). *Kelestarian Lingkungan (Studi Empiris : Pantai Embe Merak Belantung Kalianda Lampung Selatan)*. 1(2).
- Badj, B. (2024). *Lumen Veritatis*. 15(2), 193–211. <https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v15i2.3291>
- Bangsawan, M. (2026). Wawancara Tokoh Adat dan Budaya. *Pesisir Barat*, 04 Juni 2026.
- Bock, I. A., & Rodrigues, C. (2021). *Examining The Concept Of Governance In Tourism Research*. 27(3), 629–668.
- Daulah. (2025). *Archives | Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/issue/archive
- Dkk, K. K. (2024). *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap*. 23(2), 63–76. <https://doi.org/10.52352/jpar.v23i2.1527>
- Dkk, S. achrul M. (2023). *Jurnal Noken : Ilmu-Ilmu Sosial*. 9(1), 191–205.
- Fadholi, F. M. (2026). Wawancara Ketua Panitia Krui Pro. *Pesisir Barat*, 26 April 2026.
- Firqal, A. M. (2026). Wawancara bidang Ekonomi Kreatif. *Pesisir Barat*, 7 April 2026.
- Herawati, M. (2025). *Dinamika politik lokal dalam pengembangan ekonomi pariwisata: studi kasus kawasan wisata ubud*. 8(7).
- Kesuma, Q. (2026). Wawancara UMKM. *Pesisir Barat*, 26 April 2026.
- Kholili, M. I., Hisyam, M. A., Hukum, P., Syariah, B., & Madura, U. T. (2024). *Strategi pengembangan sektor wisata ramah muslim*. 15(1), 18–26.
- Listori. (2026). Wawancara Camat Pesisir Selatan. *Pesisir Barat*, 26 April 2026.
- Mahmud. (2026). Wawancara Tokoh Agama, *Pesisir Barat*, 04 Juni 2026.
- Mardiansyah. (2026). Wawancara Sekretaris Dinas Pariwisata. *Pesisir Barat*, 8 April 2026.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. PT Raja Grafindo Persada.
- Medan. (2021). *No Title*. 1, 150–172.
- Metode Penelitian Kualitatif - Afrizal - Rajagrafindo Persada* (p. 72). (2017). <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/metode-penelitian-kualitatif-afrizal/>
- Nova, E. (2023). *Pengaruh Krui Pro Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Tanjung Setia Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada* 18.
- Nuraini, D., Sudrajat, A., Hanindraputri, E. K., & Syaifullah, K. (2025). *Perubahan Makna Ruang Publik di Kawasan Wisata Kota Lama Surabaya*. 7(2), 368–374.
- Nurhayatun, T. (2024). *Analisis Teori Pariwisata Penjelajahan Diri dan Transformasi terhadap PEMKAB Pesisir Barat*. (2023). Krui Pro 2023 - Kabupaten Pesisir Barat. In *Pesisirbaratkab.go.id*. <https://pesisirbaratkab.go.id/kruiopro>
- Rahmawati, Y. (2026). Wawancara Ketua Bidang Destinasi. *Pesisir Barat* 8 April 2026.
- Rizqian, D. R. (2025). *Jurnal Sosial Politik dan Hukum Jurnal Sosial Politik dan Hukum*. 2, 20–29.
- Rosy Febriani Daud1, E. A. N. (2022). *Strategi Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan*. 3(2). <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- Siswanto. (2026). Wawancara Masyarakat. *Pesisir Barat*, 26 April 2026.
- Solosumantro, H. (2025). Relevansi Etika Politik Peter Ludwig Berger bagi Pembangunan Pariwisata Premium di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. *Icj*, 2(1), 35–41.
- Zarotis, G. F., & Zarotis, G. F. (2021). *Event Management and Marketing in Tourism*. 2576, 75–81. <https://doi.org/10.36348/gajhss.2021.v03i02.001>

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

Sellang K. Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya. *Akmen*. 2016;(February):1-229.

Sellang, Kamaruddin, Jamaluddin, Mustanir A. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*.; 2019.

Widiyatun, 2009. *Ilmu Perilaku*, Jakarta: Info Medika